

Efforts to Increase Community Income through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tunas Jaya Village, Bone Bolango Regency

Fathul Khair^{1*}, Muhammad Jihad Firman²
IAIN Sultan Amai Gorontalo

Corresponding Author: Fathul Khair fathulkhair@iaingorontalo.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: BUMDes, Effectiveness, Pajeko, Tunas Jaya

Received : 21 April
Revised : 23 May
Accepted: 23 June

©2026 Khair, Firman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

The fisheries business managed by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Tunas Jaya Village plays a crucial role in increasing the income of the Tunas Jaya Village community, particularly fishermen. In addition to providing economic benefits to the community, this business also generates revenue for the BUMDes, which can be utilized for village business development and improving community welfare. The purpose of this study was to determine the efforts and effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in increasing community income in Tunas Jaya Village, Bonepantai District, Bone Bolango Regency. This study used qualitative methods. The approach used was descriptive phenomenology. The BUMDes, together with the pajeko (traditional fishing vessel) business operators, encouraged active community participation by involving anyone willing and able to participate and strived to build trust and good cooperation between administrators, raft owners, and crew members. The pajeko business was effective in increasing the income of members in Tunas Jaya Village. It has been proven to optimally empower local potential and provide tangible economic benefits for members and the village as a whole.

Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tunas Jaya Kabupaten Bone Bolango

Fathul Khair^{1*}, Muhammad Jihad Firman²

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Corresponding Author: Fathul Khair fathulkhair@iaingorontalo.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: BUMDes, Efektivitas, Pajeko, Tunas Jaya

Received : 21 April

Revised : 23 May

Accepted: 23 June

©2026 Khair, Firman: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

Usaha perikanan yang dikelola BUMDes Desa Tunas Jaya memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tunas Jaya, khususnya nelayan. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, usaha ini juga menghasilkan pendapatan bagi BUMDes yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui upaya dan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi deskriptif. BUMDes bersama pelaku usaha pajeko mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dengan melibatkan siapa pun yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat dan berusaha membangun kepercayaan dan kerja sama yang baik antara pengurus, pemilik rakit, dan para Anak Buah Kapal (ABK). Usaha pajeko efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota di Desa Tunas Jaya. Usaha pajeko terbukti mampu memberdayakan potensi lokal secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota dan desa secara keseluruhan.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disingkat dengan BUMDes yaitu sebuah lembaga usaha pemerintah yang pengelolaannya dikerjakan oleh perangkat desa dan masyarakat desa, yang berorientasi agar memperkuat perekonomian desa. BUMDes didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan menggali potensi ekonomi yang ada di desa tersebut. BUMDes menjadi sebuah badan usaha yang berusaha membantu masyarakat dalam banyak hal semisal memenuhi kebutuhan harian, menyediakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, serta menambah wawasan masyarakat desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa, dipergunakan demi memakmurkan masyarakat desa. Perintisan, pemodalan, pelaksanaan, serta omset yang didapatkan berada di bawah naungan desa. BUMDes menjadi pilar perputaran ekonomi di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga komersial dan sosial.

Sejalan dengan itu, BUMDes memiliki peran menjadi lembaga sosial yang memihak pada aspirasi masyarakat menempuh partisipasinya dalam pengadakan pelayanan sosial. Sedangkan, sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui sumber daya lokal dan penawaran modal usaha.

BUMDes memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal yang tidak hanya mengarah pada mencari keuntungan (komersial), tapi juga pada pemberdayaan dan pelayanan sosial kepada masyarakat desa. Dalam fungsinya, BUMDes bertindak menjadi lembaga sosial yang mendukung penyediaan pelayanan publik serta sebagai lembaga ekonomi yang menghasilkan profit demi meningkatkan pendapatan anggota usaha dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur pendirian BUMDes berbadan hukum, sehingga dapat lebih profesional dalam mengelola aset dan pelayanan. (Pemerintah Republik Indonesia, 2021)

Pemerintah juga mendorong perkembangan BUMDes melalui kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi desa. Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 dan Permendesa No. 3 Tahun 2021 menjadi payung hukum dalam proses pendirian, pendataan, pemeringkatan, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia. Melalui regulasi tersebut, diharapkan BUMDes mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta aset desa untuk menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan anggotanya. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021)

BUMDes menjadi lembaga yang memicu perekonomian desa dengan meningkatkan layanan umum dan memaksimalkan aset desa. Lebih lanjut, terlihat pula bahwa BUMDes memegang fungsi sebagai penunjang perekonomian masyarakat desa dan kegiatan usaha masyarakat melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa. Desa Tunas Jaya merupakan salah satu desa yang sudah mendirikan BUMDes demi meningkatkan pendapatan anggota usaha.

Demikian pula dengan partisipasi masyarakat dan kepala desa Tunas Jaya memiliki suatu kontribusi yang sangat pokok di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut.

Harapan dengan adanya program usaha dari BUMDes dapat membantu meningkatkan pendapatan anggota usaha, khususnya pada unit usaha pajeko di Desa Tunas Jaya. Setiap BUMDes wajib memiliki pembeda dengan program-program lain pada BUMDes lainnya. Ini bertujuan untuk kinerja dan keberadaan BUMDes dapat memberikan sumbangsih yang signifikan kepada peningkatan pendapatan anggota. Berdirinya program perikanan di Desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai pada tahun 2021 yang merupakan program kerja dari BUMDes, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha pajeko di desa tersebut.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas BUMDes dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha, khususnya pada unit usaha pajeko di Desa Tunas Jaya, dapat dilihat dari data pendapatan unit perikanan BUMDes Karya Bersama Abadi yang bekerja sama dengan PT. Mitra Argo Bahari. Data ini menggambarkan penerimaan hasil tangkapan dan pendapatan bersih. Adapun rincian pendapatan unit usaha tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Pendapatan Unit Perikanan Bumdes Karya Bersama Abadi PT. Mitra Argo Bahari Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	HASIL TANGKAPAN	PENDAPATAN BUMDes (15%)
1	2022	Rp. 64.750.000	Rp. 9.712.500
2	2023	Rp. 84.090.000	Rp. 12.613.500
3	2024	Rp. 106.220.000	Rp. 15.933.000
4	2025	Rp. 110.490.000	Rp. 16.573.500

Sumber: data bumdes unit perikanan mitra argo bahari

Berdasarkan data pendapatan Unit Perikanan BUMDes Karya Bersama Abadi PT. Mitra Argo Bahari Tahun 2022–2025, terlihat bahwa usaha perikanan melalui kapal pajeko memberikan kontribusi yang terus meningkat baik terhadap pendapatan masyarakat nelayan maupun pendapatan BUMDes. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa telah mampu mendukung aktivitas usaha masyarakat di sektor perikanan.

Pada tahun 2022, nilai hasil tangkapan nelayan mencapai Rp64.750.000 dengan kontribusi pendapatan BUMDes sebesar 15% atau Rp9.712.500. Selanjutnya, pada tahun 2023 hasil tangkapan meningkat menjadi Rp84.090.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.340.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan tersebut, pendapatan BUMDes juga meningkat menjadi Rp12.613.500.

Pada tahun 2024, hasil tangkapan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp106.220.000, sehingga pendapatan yang diterima BUMDes mencapai Rp15.933.000. Kenaikan ini menunjukkan bahwa usaha perikanan yang dikelola melalui fasilitas kapal pajeko semakin produktif dan mampu meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan masyarakat nelayan.

Sementara itu, pada tahun 2025 hasil tangkapan mencapai Rp110.490.000 dengan pendapatan BUMDes sebesar Rp16.573.500. Meskipun kenaikan pada tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tren peningkatan tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 terjadi peningkatan hasil tangkapan sebesar Rp45.740.000 atau sekitar 70,64%, sedangkan pendapatan BUMDes meningkat sebesar Rp6.861.000 atau sekitar 70,64%.

Data tersebut menunjukkan bahwa unit usaha perikanan yang dikelola BUMDes Desa Tunas Jaya memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tunas Jaya, khususnya nelayan yang memanfaatkan kapal pajeko sebagai sarana penangkapan ikan. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan hasil tangkapan, usaha ini juga menghasilkan pendapatan bagi BUMDes yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, unit usaha perikanan BUMDes menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Tunas Jaya, Kabupaten Bone Bolango.

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.
- Untuk mengetahui efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan optimal dalam memanfaatkan sumber daya, sarana, dan pra- sarana dalam jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang memenuhi standar mutu tertentu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini merupakan suatu indikator yang dapat mengukur kesuksesan suatu program dengan memperlihatkan sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan berhasil tercapai atau tidak. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan program dari segi pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2012)

Dalam konteks Kamus Besar Ekonomi, efektivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran yang dihasilkan oleh suatu unit kerja atau pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap tingkat pencapaian sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitas unit kerja yang bersangkutan. (Sigit & Sujana, 2003)

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi dapat dilakukan melalui pendekatan efektivitas sebagai salah satu indikator utama. Konsep efektivitas berperan penting dalam menentukan sejauh mana suatu organisasi memerlukan perubahan atau penyempurnaan dalam struktur maupun sistem pengelolaannya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penilaian efektivitas mencakup aspek masukan (input), proses, dan keluaran (output), dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode kerja, serta model pengelolaan yang diterapkan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan efektivitas tidak hanya menekankan ketepatan pelaksanaan, tetapi juga keberhasilan dalam menghasilkan manfaat atau mencapai tujuan yang diharapkan. (Rosalina, 2014)

Efektivitas suatu kegiatan organisasi tercermin dari kemampuan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang direncanakan secara optimal.

Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel berikut (Hasbullah, Aristin, Syaiful, Anam, & Kasanova, 2022):

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan rangkaian proses yang diarahkan untuk mewujudkan target organisasi secara menyeluruh. Agar tujuan akhir dapat tercapai secara optimal, diperlukan tahapan pelaksanaan yang sistematis, baik berdasarkan urutan pencapaian setiap sasaran maupun berdasarkan periodisasi waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan meliputi jangka waktu pelaksanaan dan kejelasan sasaran yang menjadi target konkret organisasi.

Integrasi

Integrasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan organisasi dalam membangun hubungan yang efektif dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. Aspek ini mencakup kemampuan sosialisasi, membangun kesepahaman atau konsensus, serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai organisasi atau pemangku kepentingan.

Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tuntutan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Kemampuan adaptasi tercermin dari sejauh mana organisasi mampu merespon berbagai perubahan secara efektif melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan adaptasi adalah efektifitas proses pengadaan, rekrutmen, dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas digunakan sebagai dasar konseptual untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau kegiatan. Secara khusus, teori tersebut diterapkan untuk menganalisis efektivitas usaha pajeko dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha di Desa Tunas Jaya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai sarana untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. Keberadaan BUMDes bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi desa melalui kegiatan usaha yang dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kepentingan pembangunan desa. Selain berfungsi sebagai instrumen pengembangan ekonomi desa, BUMDes juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat perekonomian pedesaan, menciptakan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 sampai dengan Pasal 89, desa diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah desa melalui penyertaan modal yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan. Penyertaan modal tersebut dimanfaatkan untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, serta mengembangkan berbagai jenis usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes meliputi kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa maupun masyarakat di luar desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai wadah untuk mengelola berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dimiliki oleh desa atau dikelola melalui kerja sama antardesa. (Adinda, 2020)

Salah satu tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kewirausahaan desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Amanat mengenai pendirian BUMDes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan desa.

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- Meningkatkan perekonomian desa.
Meningkatkan pendapatan asli desa.
- Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan implementasi dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang berlandaskan pada prinsip kerja sama, partisipasi, emansipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik sehingga mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri dalam mendukung pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal utama sekaligus pendiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama masyarakat diharapkan mampu menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan BUMDes. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian perlindungan terhadap berbagai bentuk intervensi yang berpotensi merugikan, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselenggarakan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat desa. (Afandi, 2021)

Pendirian badan usaha milik desa dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum badan usaha milik desa adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; pasal 213 ayat "desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"
2. UU No. 72 tahun 2005 tentang desa

Pasal 78

- Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- Pembentukan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa terpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

- Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
- Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari:
- Pemerintah desa;
- Tabungan masyarakat;
- Bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- Pinjam; dan/atau
- Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil dasar saling menguntungkan.
- Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

- Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. (Rosa, Ratna, & Anggraeni, 2016)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

- **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2021)

METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi deskriptif. Fenomenologi merupakan studi yang berupaya untuk menjelaskan suatu makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang konsep ataupun gejala, yang di dalam nya termasuk konsep diri atau pandangan hidup tentang mereka sendiri. (Komariah, 2014) Deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat terkait dengan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu. (Abdullah, 2018)

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses yang berlangsung secara simultan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga tidak terbatas pada tahap setelah seluruh data terkumpul. Analisis dilakukan sejak tahap perencanaan, selama proses pengumpulan data, hingga tahap interpretasi dan penyusunan hasil penelitian. Oleh karena itu, analisis data mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasi, mengolah, menginterpretasikan, serta menarik makna dan kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. (Ibrahim, 2015) Peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup: 24 reduksi data; penyajian data (data display) dan; Conclusion Drawing/Verification. (Komariah, 2014)

Profil Desa Tunas Jaya

Desa Tunas Jaya terbentuk atas dasar ide dari masyarakat yang tinggal di dua dusun yakni dusun Mobuhu dan dusun Butato. Awalnya Masyarakat mengadakan sosialisasi dari dusun ke dusun untuk memberikan gambaran singkat tujuan pemekaran Desa Tamboo. Setelah itu hasil kembali bermusyawarah mengadakan rapat Umum dengan masyarakat yang ada di kedua dusun ini yang berlokasi di rumahnya Bapak Yunardi Umati S.PdI, beliau adalah anggota BPD desa Tamboo yang berdomisili di dusun Mobuhu. Pada rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan /Bapak Camat Bonepantai Bapak Muzakir Muhammad S.Pd, Kepala Cabang dinas Kecamatan Bonepantai/ Bapak Harun Tahidji, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Unsur elemen lainnya yang telah menyepakati tentang pemberian nama daesa dan sturuktur organisasi Kepemerintahan. Pemberian nama desa ini mulanya diambil dari singkatan nama Mobuhu dan Butato disingkat menjadi BUHUTA atau MOBUHU, tapi setelah diusulkan ketingkat Kabupaten maka dari pihak Pemerintah Daerah memberi nama Desa Tunas Jaya dengan berbagai alasan, seperti Desa ini adalah Desa yang siap membangun dan bahagia yang diberi julukan nama Desa Sibangga Ungkapan Kata "SIAP MEMBANGUN" mempunyai arti dimana sebagai desa yang baru

dimekarkan tentunya masyarakat mempunyai semangat yang tinggi, dalam membangun desa, melaksanakan, mensukseskan setiap program kegiatan yang dialokasikan ke desa Tunas Jaya baik bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Pembangunan yang bersifat Swadaya atau Parsitifatif demi mengarah ke Desa yang mandiri. Ungkapan Kata “BAHAGIA” mempunyai arti bahwa mensukseskan pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa Tunas Jaya dilaksanakan dengan memanfaatkan segala Potensi yang dimiliki desa dengan melibatkan seluruh lapisan Masyarakat yang berdasarkan keadilan, ketentraman, kedamaian, sejahtera mandiri dan bahagia. Desa persiapan Tunas Jaya dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang berdarah/berketurunan Jawa Tengah berasal dari Kota Solo yakni bapak Budiyanto. Desa Tunas Jaya diresmikan pada hari Rabu tanggal 4 Juli tahun 2007 oleh bapak Bupati Bone Bolango H. Ismet Mile MM dilapangan Hijau Desa Tunas Jaya dan di Definitifkan pada hari Kamis Tanggal 10 Januari Tahun 2008, oleh DPRD Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 4 Dusun : Dusun Mobuhu, Dusun Limbagu, Dusun Noosalamati dan Dusun Butato. (Desa Tunas Jaya, 2025)

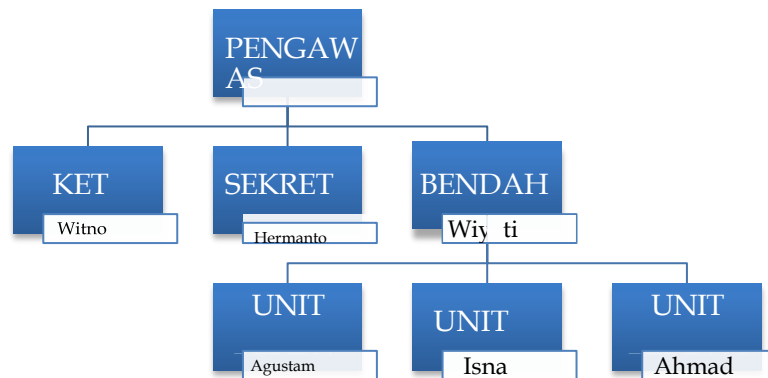
HASIL & PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tunas Jaya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tunas Jaya merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan komposisi kepemilikan modal yang didominasi oleh pemerintah desa. Keberadaan BUMDes tersebut telah memiliki dasar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibentuk melalui musyawarah desa. BUMDes Desa Tunas Jaya didirikan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan unit-unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Khususnya usaha pajeko sudah ada dari tahun 2020 pada saat itu masih dibawah kepengurusan Pemerintah Desa (Pemdes) kemudian pada tahun 2021 kepengurusan usaha pajeko diserahkan kepada BUMDes. Namun, pada saat itu masih menunggu alat-alat yang dibutuhkan untuk usaha pajeko sehingga baru mulai beroperasi tahun 2022. Alasan yang melatar belakangi adanya usaha pajeko ialah wilayah Desa Tunas Jaya adalah bagian dari Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian wilayah terdiri atas wilayah pesisir pantai, wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan lembah. Ada dua Dusun yakni dusun Mobuhu dan dusun Limbagu di Desa Tunas Jaya yang merupakan wilayah pesisir pantai yang terbentang disepanjang 1,81 kilometer pesisir pantai. Dan sebagian besar warga masyarakat tersebut penghidupannya adalah Nelayan pinggiran. (Podungge, 2026)

Gambar 1
Struktur Organisasi BUMDes Tunas Jaya



Tugas pokok pengurus BUMDes di Desa Tunas Jaya:

- Pengawas yaitu melakukan pengawasan dan memantau pelaksanaan operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUMDes
- Ketua yaitu memimpin, mengendalikan dan bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.
- Sekretaris yaitu mengelola administrasi, dokumentasi serta menyimpan data dan informasi BUMDes.
- Bendahara yaitu melaksanakan kebijakan operasional fungsi keuangan unit usaha BUMDes, mengawasi dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Unit usaha yaitu menghasilkan pendapatan bagi BUMDes, mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tunas Jaya guna mendorong dan penampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai kegiatan masyarakat setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Visi dan Misi BUMDes Tunas Jaya

Visi

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tunas Jaya melalui pengembangan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan”

Misi

- Mengembangkan usaha desa yang berbasis potensi lokal.
- Meningkatkan pendapatan asli desa.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa dan pengelolaan BUMDes. (Podungge, 2026)

Badan Usaha Milik Desa Tunas Jaya didirikan sejak tahun 2021, yang mana pendirian BUMDes ini diharapkan dapat mensejahterahkan peningkatkan pendapatan masyarakat dengan membantu perekonomian masyarakat ataupun pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat desa sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih aktif dan berdaya secara ekonomi. Di Desa Tunas Jaya, salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah usaha pajeko, yakni kegiatan perikanan tangkap yang memanfaatkan kapal pajeko sebagai alat utama untuk melaut.

Dengan kata lain, pengelolaan usaha pajeko secara bersama-sama dan profesional oleh BUMDes Desa Tunas Jaya tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan para anggotanya, tetapi juga berperan sebagai sarana penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Namun hal yang di alami pemerintah desa juga pengurus BUMDes tidak begitu berjalan sesuai eksptasi sehingga terdapat beberapa kesulitan yang menjadi hambatan. Khususnya pada usaha pajeko kesulitan yang sering dihadapi adalah musim dan ombak. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Witno Podungge selaku Ketua BUMDes Tunas Jaya:

“Kesulitan yang dihadapi adalah musim dan ombak. Musim ikan bisa membawa hasil yang banyak, tapi ombak dan cuaca buruk menyulitkan nelayan untuk melaut.” (Podungge, 2026)

Adapun wawancara dengan Bapak Hermanto Pantolay selaku Sekretaris BUMDes mengenai kesulitan lain:

“Yang menjadi kesulitan yaitu kepengurusan surat dokumen kapal atau pajeko salah satunya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang menjamin bahwa pajeko memiliki izin untuk beroperasi” (Pantolay, 2026)

Selain itu kesulitan lain juga dirasakan Bapak Hadi Suharno selaku anggota pajeko, ia mengatakan:

“Kesulitan yang dihadapi kita sebagai Anak Buah Kapal (ABK), adalah banyak anggota pajeko tidak mau melaut karena musim ikan yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu ketika ikan tidak muncul dipermukaan.” (Suharno, 2026)

Ibu Wiyanti Kango selaku Bendahara BUMDes juga menyampaikan:

“Yang menjadi kendala yaitu penurunan hasil tangkapan ikan. Karena dikemudian hari biasanya kapal atau pajeko perlu perbaikan, apabila penghasilan atau pendapatan menurun maka akan kesulitan dalam memperbaiki kapal atau pajeko.” (Kango, 2026)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa usaha pajeko menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kondisi alam, perizinan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan ekonomi dan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga desa, maupun pelaku usaha itu sendiri.

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami baik dari pihak BUMDes maupun anggota pajeko beberapa upaya yang dilakukan agar usaha pajeko diharapkan terus berjalan. Dalam wawancara dengan Bapak Witno Podungge selaku Ketua BUMDes di Desa Tunas Jaya mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan ia menyampaikan:

“Untuk menjaga operasional pajeko yang berkelanjutan, diperlukan kerja sama dan kepercayaan antara BUMDes, anggota pajeko, pemilik rakit, dan Pemdes. Pembagian hasil tangkapan yang adil sesuai kesepakatan dan pengelolaan rakit yang baik dapat membangun kepercayaan pemilik rakit terhadap pajeko, sehingga pemilik rakit tidak membiarkan pajeko lain menangkap ikan dirakitnya.” (Podungge, 2026)

Upaya lain juga disampaikan Bapak Adam Tongkonoo selaku Kapten kapal atau pajeko untuk mengatasi kesulitan yaitu:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Hasil tangkapan ikan dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mendapatkan harga yang kompetitif.” (Tongkonoo, 2026)

Adapun wawancara dengan Bapak Owan Kadula selaku anggota usaha pajeko mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dalam usaha pajeko salah satunya adalah dengan melakukan perawatan rutin pada kapal dan peralatan, sehingga bisa beroperasi dengan baik.” (Kadula, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak yang terlibat dalam usaha pajeko, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan peningkatan pendapatan dalam usaha ini sangat bergantung pada sinergi antar berbagai elemen, yaitu BUMDes, anggota pajeko, pemilik rakit, dan pemerintah desa. Kerja sama yang solid dan saling percaya merupakan fondasi utama yang mendukung kelangsungan usaha pajeko. Salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan adalah pembagian hasil tangkapan yang dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selain itu, pengelolaan rakit yang profesional akan membangun rasa aman bagi pemilik rakit, sehingga mereka tidak tergoda untuk membuka akses bagi pajeko lain.

Dari sisi operasional, strategi pemasaran yang efektif seperti menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sangat membantu untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan nelayan. Langkah ini menunjukkan bahwa aspek hilir dari usaha penangkapan ikan juga perlu dikelola dengan baik agar nilai ekonomi yang dihasilkan maksimal. Selain itu, aspek teknis juga tidak kalah penting. Perawatan rutin terhadap kapal dan peralatan menjadi langkah preventif untuk menghindari kerusakan yang dapat

menghambat operasional. Dengan kondisi alat dan kapal yang selalu siap pakai, kegiatan penangkapan ikan dapat berjalan lancar dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam usaha pajeko di bawah pengelolaan BUMDes Desa Tunas Jaya, ditemukan sejumlah tantangan dan upaya yang menggambarkan dinamika pelaksanaan usaha ini. Temuan-temuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan usaha pajeko dan strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Usaha pajeko sebagai salah satu unit usaha unggulan BUMDes Desa Tunas Jaya menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut meliputi:

- Faktor Alam: Cuaca ekstrem, ombak besar, dan musim ikan menjadi kendala utama yang dihadapi oleh nelayan. Cuaca buruk membatasi aktivitas melaut, sementara musim ikan yang tidak menentu membuat hasil tangkapan tidak stabil.
- Permasalahan Perizinan: Salah satu kendala administratif yang signifikan adalah kesulitan dalam pengurusan dokumen legalitas kapal, seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang diperlukan agar kapal pajeko dapat beroperasi secara legal dan aman.
- Keterbatasan SDM dan Motivasi: Kurangnya motivasi dari sebagian Anak Buah Kapal (ABK) untuk melaut saat musim ikan tidak mendukung menunjukkan adanya tantangan dari sisi kesiapan sumber daya manusia.
- Permasalahan Ekonomi dan Perawatan Kapal: Penurunan pendapatan akibat minimnya hasil tangkapan berdampak langsung pada kemampuan anggota untuk melakukan perawatan dan perbaikan kapal pajeko, yang justru sangat krusial bagi keberlanjutan operasional.
- Meskipun menghadapi banyak tantangan, pihak BUMDes bersama para pelaku usaha pajeko berinisiatif untuk melakukan berbagai upaya perbaikan, yang meliputi aspek sosial, manajerial, hingga teknis:
- Membangun Kepercayaan dan Kerja Sama: Ketua BUMDes menekankan pentingnya membangun kepercayaan antar pihak BUMDes, pemilik rakit, dan anggota pajeko melalui pembagian hasil yang adil dan pengelolaan rakit yang baik. Hal ini menjadi kunci untuk menjaga hubungan baik dan eksklusivitas akses terhadap rakit milik warga.
- Strategi Pemasaran Efektif: Kapten kapal pajeko menjelaskan bahwa hasil tangkapan dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif. Hal ini mencerminkan adanya upaya optimalisasi aspek hilir dari kegiatan perikanan, yang seringkali kurang mendapat perhatian.
- Perawatan Rutin Kapal dan Peralatan: Di tingkat teknis, dilakukan perawatan berkala terhadap kapal dan alat tangkap sebagai langkah pencegahan kerusakan dan hambatan operasional. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan alat saat musim ikan tiba.

Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha pajeko tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan hasil dari interaksi dan sinergi antara faktor alam, manajemen usaha, kerja sama sosial, dan kemampuan teknis para pelaku usaha. Faktor kepercayaan dan pembagian hasil yang adil menjadi fondasi penting dalam menjaga kelangsungan usaha, sementara strategi hilir seperti pemasaran dan pemeliharaan alat menjadi penunjang efektivitas kegiatan perikanan.

Dengan demikian, dibutuhkan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BUMDes, pemilik rakit, dan para anggota usaha pajeko, untuk terus memperkuat kolaborasi serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada secara terpadu. Pendekatan ini sangat penting guna memastikan usaha pajeko tetap berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan anggota pajeko di Desa Tunas Jaya.

Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Radius Murtono selaku anggota pajeko mengenai efektivitas usaha pajeko dalam meningkatkan pendapatan:

“Untuk saat ini alhamdulillah sudah berhasil, karena pada bulan puasa tahun lalu tangkapan 1 bulan sekitar 20 juta dan keuangannya sudah kami kembalikan untuk perbaikan kapal dan sekarang sudah tahapan pembelian jaring baru dan sementara dikerjakan.” (Murtono, 2026)

Adapun wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan selaku anggota pajeko mengatakan:

“Untuk meningkatkan pendapatan itu sudah 75% berhasil, karena sebagian besar anggota pajeko berasal dari Desa Tunas Jaya sehingga tidak perlu lagi merekrut pekerja dari luar.” (Hasan, 2026)

Dan juga menurut Bapak Kasman Tongkonoo selaku anggota pajeko menjelaskan bahwa:

“Usaha pajeko yang dijalankan sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup berhasil. Pendapatan yang diperoleh dari usaha ini terbilang besar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan anggota pajeko” (Tongkonoo K. , 2026)

Sebagaimana juga dikatakan oleh Bapak Djafar Darise selaku anggota pajeko sebagai berikut:

“Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, bisa dikatakan usaha pajeko ini cukup berhasil, karena pendapatan yang diperoleh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.” (Darise, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota usaha pajeko, dapat disimpulkan bahwa usaha ini telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya anggota pajeko di Desa Tunas Jaya.

Beberapa indikator keberhasilan usaha pajeko tercermin dari pendapatan yang signifikan selama musim penangkapan, seperti yang diungkapkan salah satu anggota bahwa pada bulan puasa lalu, usaha ini mampu menghasilkan sekitar 20 juta rupiah dalam satu bulan. Pendapatan tersebut tidak hanya digunakan untuk

kebutuhan pribadi, tetapi juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, seperti perbaikan kapal dan pembelian jaring baru, yang menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang sehat dalam skala usaha kecil.

Selain itu, keberhasilan ini juga tercermin dari keberdayaan tenaga kerja lokal. Sebagian besar anggota pajeko berasal dari Desa Tunas Jaya, sehingga usaha ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar dan secara langsung memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat desa.

Seluruh narasumber menyatakan bahwa pendapatan dari usaha pajeko telah memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi indikator bahwa secara umum, usaha pajeko telah berjalan cukup efektif dan memiliki potensi untuk terus berkembang apabila dikelola dengan baik.

BUMDes Tunas Jaya dengan menggunakan tiga indikator utama sebagai alat ukur:

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan proses untuk menilai sejauh mana sebuah program atau kegiatan berhasil merealisasikan sasaran yang telah dirumuskan. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap pencapaian tujuan menjadi langkah penting untuk mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan. Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam konteks BUMDes, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan usaha pajeko adalah meningkatkan pendapatan anggota. Melalui hasil wawancara dengan Bapak Witno Podungge selaku Ketua BUMDes:

“Selama ini, usaha pajeko cukup berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan para Anak Buah Kapal (ABK). Keberhasilan ini dilihat dari bertambahnya pemasukan desa serta penghasilan anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan melaut.” (Podungge, 2026)

Dari pernyataan tersebut bahwa usaha pajeko yang dikelola oleh BUMDes Desa Tunas Jaya telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, tren positif ini menunjukkan bahwa unit usaha pajeko memiliki potensi besar dalam menopang keuangan desa dan mendukung program-program pembangunan yang bersumber dari PAD.

Selain itu, usaha pajeko juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya para Anak Buah Kapal (ABK) yang terlibat langsung dalam kegiatan penangkapan ikan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut telah membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, usaha pajeko tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi desa secara umum, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang terlibat secara aktif di dalamnya.

Integrasi

Integrasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada upaya menyatukan berbagai program dan aktivitas usaha agar berjalan selaras menuju pencapaian tujuan bersama. Melalui integrasi ini, BUMDes diharapkan dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien dalam memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat desa. Dalam konteks usaha pajeko, integrasi dilakukan dengan menghubungkan berbagai elemen yang mendukung kelancaran usaha, seperti pengelolaan hasil tangkapan, perawatan kapal, pemasaran, dan kerja sama dengan pemilik rakit maupun pemerintah desa. Dengan adanya sinergi antarunit dan pelaku usaha di dalam BUMDes, usaha pajeko dapat berjalan lebih optimal serta mampu meningkatkan pendapatan anggota dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alfandri Pontoan selaku anggota pajeko menjelaskan:

“Selama ini BUMDes sering mengajak warga yang mau terlibat, termasuk kami yang jadi anggota pajeko. Siapa saja yang siap bantu, biasanya langsung diajak bergabung atau dilibatkan.” (Pontoan, 2026)

Dari pernyataan tersebut, selama ini BUMDes aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha desa. Masyarakat yang memiliki kemauan dan kesiapan untuk berkontribusi, terutama dalam kegiatan usaha seperti pajeko, biasanya akan diajak bergabung tanpa ada hambatan yang berarti.

Pendekatan BUMDes cukup terbuka, sehingga siapa pun yang ingin membantu, baik dalam bentuk tenaga, keahlian, maupun dukungan lainnya, akan langsung dilibatkan dalam kegiatan usaha. Hal ini membuat anggota merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam menjalankan roda ekonomi desa melalui usaha pajeko.

Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya. BUMDes Tunas Jaya mengembangkan usaha pajeko sebagai bentuk respons terhadap potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh desa. Potensi ini kemudian dimanfaatkan melalui pengelolaan armada kapal dan dukungan modal, yang selanjutnya mampu menghasilkan pendapatan yang bernilai bagi desa maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Hermanto Pantolay selaku Sekretaris BUMDes Tunas Jaya menjelaskan:

“Memilih usaha pajeko karena laut di sekitar desa cukup potensial. Banyak warga juga sudah biasa melaut, jadi usaha ini cocok dijalankan. Hasil ikannya bisa dijual dan bantu tambah penghasilan anggota serta pemasukan desa.” (Pantolay, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, alasan dipilihnya usaha pajeko oleh BUMDes Tunas Jaya didasari oleh potensi laut yang cukup besar di sekitar wilayah desa. Kondisi geografis yang mendukung dan ketersediaan sumber daya alam menjadikan usaha perikanan tangkap ini sebagai pilihan yang relevan dan strategis. Selain itu, latar belakang masyarakat yang mayoritas memiliki pengalaman sebagai nelayan juga menjadi faktor pendukung dalam menjalankan usaha ini.

Usaha pajeko dianggap sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga mudah diterapkan dan dikelola. Hasil tangkapan ikan dari usaha ini tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan para anggota, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan demikian, usaha pajeko menjadi salah satu upaya BUMDes yang efektif dalam menggali potensi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil telaah terhadap pengelolaan usaha pajeko oleh BUMDes Tunas Jaya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas usaha ini cukup tinggi dalam mendukung peningkatan pendapatan anggota dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Efektivitas tersebut tercermin dari tiga indikator utama:

- Pencapaian Tujuan, Usaha pajeko berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan pendapatan anggota, khususnya para Anak Buah Kapal (ABK). Meskipun peningkatannya belum signifikan, arah perkembangannya menunjukkan tren positif dan potensi yang besar dalam menopang ekonomi desa.
- Integrasi, Kegiatan usaha pajeko dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif dan terbuka. Kolaborasi antara pengurus BUMDes, anggota, serta mitra lainnya menunjukkan adanya sinergi yang baik, sehingga mendukung kelancaran operasional usaha dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes.
- Adaptasi, Pemilihan usaha pajeko menunjukkan kemampuan adaptif

BUMDes dalam memanfaatkan potensi lokal. Kondisi geografis desa yang kaya akan sumber daya laut serta latar belakang masyarakat sebagai nelayan menjadikan usaha ini relevan dan mudah diimplementasikan, sehingga dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Secara keseluruhan, usaha pajeko yang dijalankan oleh BUMDes Tunas Jaya terbukti efektif dalam memberdayakan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

KESIMPULAN

BUMDes Tunas Jaya menunjukkan adanya berbagai upaya serius dalam meningkatkan pendapatan anggota meskipun dihadapkan pada sejumlah hambatan. BUMDes bersama pelaku usaha pajeko berusaha membangun kepercayaan dan kerja sama yang baik antara pengurus, pemilik rakit, dan para Anak Buah Kapal (ABK). Hal ini dilakukan melalui sistem pembagian hasil yang adil dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, BUMDes juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dengan melibatkan siapa pun yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat. Di sisi teknis, langkah-langkah seperti perawatan rutin kapal dan alat tangkap dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, sementara dari sisi pemasaran, hasil tangkapan dijual melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar memperoleh harga yang lebih baik. Seluruh upaya ini merupakan bentuk respon terhadap tantangan yang ada dan mencerminkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

Kemudian, usaha pajeko cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota di Desa Tunas Jaya. Efektivitas ini terlihat dari pencapaian tujuan utama usaha, yakni bertambahnya penghasilan para ABK serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Kegiatan usaha ini juga berjalan secara terpadu melalui integrasi berbagai elemen, seperti pengelolaan hasil tangkapan, perawatan kapal, pemasaran, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa usaha ini dijalankan secara inklusif dan mampu memperkuat rasa memiliki warga terhadap BUMDes. Selain itu, adaptasi usaha pajeko terhadap kondisi geografis dan sosial desa menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Potensi laut yang melimpah dan masyarakat yang telah terbiasa melaut menjadikan usaha ini relevan dan mudah diimplementasikan. Oleh karena itu, usaha pajeko terbukti mampu memberdayakan potensi lokal secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota dan desa secara keseluruhan.

REFERENCES

- Abdullah, K. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Depok: Gunadarma Ilmu.
- Adinda, P. N. (2020). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pringgodani Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pada Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*.
- Afandi. (2021). *Efektivitas Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)*.
- Darise, D. (2026, Februari 07). *Anggota Pajeko*. (F. Khair, Pewawancara)
- Desa Tunas Jaya. (2025). *Dokumen RKP-Desa Tunas Jaya Kecamatan Bonepantai. Bonebolango: Desa Tunas Jaya*.
- Hasan, A. (2026, Februari 07). *Anggota Pajeko*. (F. Khair, Pewawancara)
- Hasbullah, H., Aristin, R., Syaiful, S., Anam, S., & Kasanova, R. (2022). *Efektivitas Organisasi Dalam Perspektif Model Richard M. Streers di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*. KABILAH: Journal

of Social Community, 63-72.

Ibrahim, M. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kadula, O. (2026, Februari 04). Anggota Pajeko. (F. Khair, Pewawancara)

Kango, W. (2026, Februari 2). Bendahara BUMDes . (F. Khair, Pewawancara)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Murtono, R. (2026, Februari 07). Anggota Pajeko. (F. Khair, Pewawancara)

Pantolay, H. (2026, Januari 31). Sekertaris BUMDes. (F. Khair, Pewawancara)

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Podungge, W. (2026, Januari 31). Ketua BUMDes Tunas Jaya. (F. Khair, Pewawancara)

Pontoan, A. (2026, Februari 04). Anggota Pajeko. (F. Khair, Pewawancara)

Rosa, M., Ratna, & Anggraeni, S. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Studi Pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta*. Modus, 155-168.

Rosalina, I. (2014). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren*

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Publika, 202.

Siagian, S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Jakarta: PT. Bumi Aksar.

Sigit, W., & Sujana, I. (2003). Kamus Besar Ekonomi. Bandung: CV Pustaka Grafika.

Suharno, H. (2026, Februari 04). Anggota Pajeko. (F. Khair, Pewawancara)

Tongkonoo, A. (2026, Februari 07). Kapten Kapal/Ketua Pajeko. (F. Khair, Pewawancara)

Tongkonoo, K. (2026, Februari 07). Anggota Pejeko. (F. Khair, Pewawancara)